

**USKUP SIPRIANUS MESTI ENDUS NEOLIBERALISME**  
**(Uskup Baru dalam Geliat Wisata Premium Labuan Bajo)**  
P Alexander Jebadu SVD  
(Dosen Sistem Ekonomi Neoliberal pada STFK Ledalero)

---

Dari Mgr Siprianus Hormat sebagai uskup baru, umat Katolik Manggarai tentu mempunyai banyak harapan. Tapi seperti dikatakan uskup sendiri belum lama ini, seorang uskup itu tidak seperti seorang bupati. Begitu seorang bupati dipilih, orang sudah siap tunggu pembangunan fisik apa yang akan dibuatnya. Bupati memang harus siap lakukan itu. Itu tugas utamanya dan untuk itu ia ditopang dengan kekuatan uang pajak rakyat yang dikembalikan lagi kepada rakyat melalui APBD. Seorang uskup tidak bisa diharapkan seperti itu.

Seorang uskup pertama-tama dan terutama merupakan seorang pemimpin rohani. Tugas pokoknya adalah memberi kesaksian tentang iman akan kasih, persaudaran dan keadilan. Ia terutama bertugas untuk menyerukan suara kenabian dan merangkul semua orang dalam kegemalaan suci. Karena itu, hal-hal yang perlu diantisipasi dari uskup baru Keuskupan Ruteng bersama seluruh komponen agen pastoralnya adalah keutamaan-keutamaan seperti ini. Uskup dan seluruh komponen pastoral keuskupan harus sungguh-sungguh menampilkan kekudusan pelayanan imamat, berani menyampaikan suara kenabian untuk membela umat yang sekian sering dibelenggu oleh sistem sosial, ekonomi dan politik yang sering tidak memihak kepentingan rakyat dan bahkan sebaliknya malah mengeksploitasi rakyat.

Selain itu, uskup baru ini juga tentu diharapkan berusaha menyembuhkan kekecewaan-kekecewaan umat oleh peristiwa-peristiwa masa lalu di keuskupan ini dan persatukan kembali kelompok-kelompok yang berseberangan, antara yang pro dan kontra, sehubungan dengan cara hidup sang gembala sebelumnya. Sangat diharapkan, semua pihak menguburkan hal-hal yang telah lalu dan dengan penuh kasih mau memulai lagi sebuah kehidupan menggereja secara baru. Pentahbisan Uskup Siprianus Hormat Pr pada masa puasa ini kiranya sungguh-sungguh menjadi momen pembaharuan umat Katolik Keuskupan Ruteng untuk kembali membangun persatuan dalam rangka karya pastoral missioner di keuskupan ini.

Selain itu, menurut saya, selain reksa pastoral yang sudah digariskan oleh Sinode I, II dan III Keuskupan Ruteng, ada beberapa hal mendesak yang perlu mendapat perhatian khusus dari uskup baru bersama seluruh komponen agen pastoralnya demi sebuah pelayanan pastoral missioner di Keuskupan Ruteng yang lebih baik.

*Pertama*, masalah kemungkinan umat Katolik Manggarai menjadi orang asing di tanah sendiri. Kalau orang sungguh membuka mata, Era Reformasi sejak tahun 2000-an ini, selain ditandai oleh perampasan tanah warga masyarakat miskin oleh industri pertambangan yang sangat bermasalah dari pelbagai segi (bdk Alex Jebadu dkk, *Pertambangan di Flores: Berkah atau Kutuk?*, 2010), juga sangat kuat ditandai oleh gejala jual-beli tanah yang semakin semarak. Didesak oleh kemiskinan, banyak umat Manggarai terutama di tempat-tempat strategis seperti di kota Ruteng, umat sepanjang jalan trans-Flores dari Waelengga ke Labuan Bajo, umat sepanjang pantai dari Dintor di Pulau Mules, Nangalili, Lembor, Labuan Bajo, Rangko, Boleng,

Terang, Nanga Kantor, Bari, Nanga Asu, Nggilat, Lemarang, Robek, Reo, Dampek dan Pota yang telah menjual tanahnya kepada pihak luar, baik itu orang asing manca negara maupun saudara-saudaranya sendiri di Jakarta atau Surabaya yang sudah kaya.

Seperti sudah banyak terjadi di banyak tempat lain di seluruh dunia dan wilayah-wilayah lain di Indonesia, di Manggarai sedang terjadi fenomena perampasan tanah (*landgrabbing*) dari tangan warga masyarakat miskin oleh orang kaya atau pemerintah negara dengan pelbagai modus pembangunan model neokapitalistik seperti Pariwisata Premium Labuan Bajo.

Bukan tak mungkin suatu saat, sebahagian besar umat keuskupan Ruteng akan menjadi orang asing di tanahnya sendiri karena ketiadaan tanah untuk hidup. Karena itu, uskup baru bersama seluruh komponen Keuskupan Ruteng mesti sigap membaca fenomena ini dengan mata seorang nabi. Uskup baru bersama seluruh agen pastoral Keuskupan Ruteng mesti mengedukasi umat Katolik Manggarai agar tidak mudah tergiur uang milliaran rupiah tapi kehilangan tanah sebagai sumber hidup bagi anak cucu, cece, cicit dan buyut mereka untuk selamanya.

Salah satu cara yang bisa ditempuh untuk mencegah hal ini adalah uskup dan Keuskupan Ruteng mesti mendorong dan memfasilitasi pemerintah ketiga kabupaten di Manggarai supaya setiap daerah kabupaten menerbitkan peraturan daerah (perda) untuk mengamankan lahan-lahan pertanian warga masyarakat di seluruh Keuskupan Ruteng mulai dari Wae Mokel di bagian timur hingga Selat Sape di bagian barat. Warga masyarakat mesti dididik untuk tidak menjual tanahnya kepada pihak luar demi sebuah kehidupan yang berkelanjutan (*sustainable life*) hingga anak cucu.

Seperti yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah di Bali, setiap pemerintah daerah kabupaten di Keuskupan Ruteng mesti memaksa warga masyarakat melalui sebuah peraturan daerah (perda) untuk tidak menjual tanah-tanah mereka kepada orang asing kecuali disewakan atau dikontrak. Hal ini sudah dipraktikkan di beberapa tempat lain di Indonesia termasuk Bali.

Di Bali, hampir tidak ada orang Bali yang mau menjual tanah. Kalau orang Bali tidak memiliki cukup modal untuk membuka usaha, mereka biasanya menyewakan dan mengontrak tanah mereka dengan ukuran luas tertentu kepada pebisnis entah selama 10 tahun atau 25 tahun. Setelah kontrak selesai, ia bisa memperoleh kembali tanah itu beserta seluruh aset di atasnya. Atau setelah itu kontraknya bisa diperpanjang dengan sebuah perundingan baru lagi. Orang Bali dan anak-anak cucu mereka, karenanya, tidak akan pernah kehilangan tanah untuk berpijak.

Kebijakan yang sama ini seharusnya mesti dibuat juga oleh ketiga daerah kabupaten di Manggarai. Ia mesti diamankan dengan Perda yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Gereja Katolik Manggarai, dalam rangka kesejahteraan umatnya, mesti mendorong dan bahkan bila perlu mendesak pemerintah daerah ketiga kabupaten Manggarai untuk melakukan ini, yaitu menerbitkan perda yang memaksa warga masyarakat untuk tidak menjual tanahnya kepada orang asing. Dorongan ini merupakan bagian hakiki dari tugas kenabian dan kegembalaan seorang uskup bersama segenap agen pastoral di keuskupannya dan menjadi bagian dari misi suci yang sering diserukan oleh Ajaran Sosial Gereja Katolik.

**Kedua**, mengkritisi pembangunan model neokapitalistik. Bersamaan dengan fenomena perampasan tanah milik para petani miskin oleh orang kaya dan pemerintah negara, Manggarai

Raya juga sedang digalakkan pembangunan kolosal dalam bentuk Pariwisata Premium yang berpusat di Labuan Bajo.

Kurang lebih sejak tahun 2010 pemerintah Indonesia menggulirkan sebuah proyek nasional. Taman Nasional Komodo akan dirancang menjadi wisata premium berkelas dunia. Untuk itu, misalnya, Kota Labuan Bajo akan diperindah. Hotel-hotel berkelas dunia akan ditambah jumlahnya. Pelabuhan niaga/peti kemas yang identik dengan kotor-motor itu akan dipindahkan ke Bari di Kecamatan Macang Pacar sekitar 40-an km dari Labuan Bajo. Dari pulau yang satu ke pulau yang lain di Kepulauan Komodo akan dihubungkan dengan kreta kabel gantung. Tiket masuk Taman Nasional Komodo nanti menjadi US\$1000 atau sekitar Rp14 juta per orang.

Nanti tiket masuk Komodo Rp14 juta per orang? Rakyat miskin mana nanti yang mau habiskan uang segede itu untuk pelesir beberapa jam lihat binatang komodo di Pulau Komodo? Kalaupun ada orang miskin yang paksa diri, ia harus piara 4 ekor babi selama setahun lebih untuk dapat uang Rp14 juta untuk bayar tiket ke Komodo.

Semakin jelas bahwa proyek wisata premium yang sedang digulirkan oleh pemerintah ini bukan untuk mengangkat ekonomi rakyat kebanyakan seperti yang digembar-gemborkan. Ini proyek negara yang dibuat atas nama rakyat tapi nikmatnya nanti bukan untuk rakyat melainkan untuk segelintir orang kaya. Selain tiket masuk Komodo yang super mahal itu nanti, sudah diendus beberapa hal lain yang menunjukkan bahwa pembangunan wisata premium ini bukan untuk rakyat kebanyakan.

Misalnya, pemerintah sudah memberi isinan investasi eksklusif kepada sejumlah perusahaan swasta. Mereka bisa mengkapling-kapling tanah dengan ukuran maha luas di Pulau Rinca dan Komodo. Tanpa disadari banyak orang, ini merupakan bagian dari privatisasi ekonomi yang digulirkan oleh sistem ekonomi kapitalis neoliberal atau sistem ekonomi pasar bebas tanpa kendali. Dalam privatisasi ini, banyak politisi yang merangkap sebagai pebisnis berlomba-lomba mengkapling tanah di Taman Nasional Komodo, tanah di Labuan Bajo dan sekitarnya serta tanah-tanah sepanjang pantai dari Labuan Bajo hingga Reo.

Tak berlebihan untuk disimpulkan bahwa pembangunan pariwisata premium Labuan Bajo merupakan proyek dari para oligarki (=sekelompok orang kaya yang sedang menguasai negara) yang berpakaian sebagai politisi dan pemerintah negara. Pelaksanaannya dieksekusi oleh perusahaan-perusahaan swasta milik mereka sendiri maupun asing. Dengan sendirinya keuntungannya nanti akan didulang perusahaan pribadi mereka sendiri. Pembangunan pariwisata premium Labuan Bajo bukan untuk rakyat miskin, meskipun sering digembar-gemborkan dibuat atas nama rakyat.

Kebohongan pembangunan pariwisata premium seperti ini, yang sudah banyak terjadi di tempat lain di seluruh dunia, disebut oleh John Madeley dalam bukunya *Big Business Poor Peoples/Bisnis Besar Masyarakat Tetap Miskin: Bagaimana Perusahaan-Perusahaan Dunia Merusak Dunia Orang Miskin di Pelbagai Negara* (Gramedia 2013) sebagai sebuah **ilusi besar** (*big illusion*).

Menurut ajaran sosial Gereja Katolik, ilusi pembangunan pariwisata premium seperti ini masuk dalam kategori pembangunan yang tidak adil dan bertentangan dengan nilai-nilai Kerajaan Allah yang dibawa oleh Yesus Kristus. Atas nama Tuhan dan demi orang miskin yang dirugikan, dibohong dan dieksploitasi, Gereja mesti berani melancarkan suara kenabian untuk mengeritik, mencela dan bila perlu mengutuknya.

Untuk itu, uskup baru bersama seluruh agen pastoral Keuskupan Ruteng perlu mengkaji pembangunan neokapitalistik di Labuan Bajo ini dan menjadikannya sebagai satu prioritas misi keuskupan (*an urgent mission frontier*) demi umat gembalaannya. Bila hasil kajiannya menunjukkan bahwa pembangunan wisata premium ini ternyata tidak menguntungkan umat Keuskupan Ruteng dan warga Manggarai pada umumnya, Gereja Keuskupan ruteng mesti tunjukkan sikap kenabian dan berani katakan: *No* (Tidak) terhadapnya! Menurut Konstitusi (bdk UUD45 Pasal 33) dan undang-undang, semua proyek pembangunan adalah sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Kalau proyek pariwisata premium Labuan Bajo ternyata tidak untuk rakyat, ia bisa didesak untuk ditinjau kembali dan bila perlu dibatalkan.

*Ketiga*, kembalikan konsep tentang Gereja lokal pada artinya yang benar. Konsep Gereja lokal merupakan turunan dari konsep tentang Gereja universal. Secara singkat, Gereja universal merupakan persekutuan spiritual seluruh umat Kristen Katolik di seluruh dunia di bawah pimpinan paus sebagai imam, nabi dan gembala utamanya.

Komponen-komponen Gereja universal adalah seluruh umat beriman di seluruh dunia, para imam projo seluruh dunia, para imam serikat religius seluruh dunia serta bruder dan suster seluruh dunia. Di dalam Gereja universal, semua komponen ini merupakan satu kesatuan dari Gereja yang satu dan sama sebagai Tubuh Mistik Yesus. Tidak ada yang berada di luar Gereja universal. Lalu misi Gereja universal berada di pundak dari semua komponen ini tanpa ada pembedaan yang dikotomis.

Gereja lokal (bisa lokal Asia, lokal Nusa Tenggara, lokal NTT, lokal Pulau Flores dan bisa juga lokal keuskupan) merupakan persekutuan umat Kristen Katolik di sebuah wilayah termasuk wilayah sebuah keuskupan. Seperti Gereja universal, komponen-komponen Gereja lokal keuskupan adalah semua umat beriman di satu keuskupan, semua imam projo, semua imam serikat religius yang sedang berada dalam keuskupan bersangkutan dan para suster dan bruder di dalam keuskupan tersebut. Tidak ada yang berada di luar keuskupan.

Misi keuskupan yang anggotanya demikian berada di pundak dari semua komponen ini dan keberhasilannya akan ditentukan oleh sejauh mana semua komponen ini difungsikan untuk bahu membahu melanjutkan *missio Dei* (misi Allah) yang satu dan sama yang sedang diembankan oleh sebuah keuskupan termasuk keuskupan Ruteng di bawah pimpinan uskupnya yang baru. Satu di antara sekian banyak misi dari Gereja Kristen Katolik Keuskupan Ruteng, maupun misi Gereja Kristen Katolik keuskupan-keuskupan lain, Gereja-gereja Kristen Protestan dan misi agama-agama lain di Indonesia, adalah memerangi sistem ekonomi kapitalis neoliberal yang semakin tidak memihak kepentingan rakyat jelata seperti yang dalam bentuk proyek nasional pariwisata premium di Labuan Bajo yang tampaknya penuh dengan mafia kepentingan oligarki. Ketakadilan model pembangunan neoliberalistik bertentangan dengan nilai-nilai Injil Kerajaan

Allah – kasih, keadilan, persaudaraan dan kesetiakawanan – dan karena itu usaha menentanginya merupakan bagian konstitutif dari karya misi pembebasan Gereja. @@@